



Pendidikan Intereligi Wacana Moderasi Beragama di Ruang Publik

Riza Muhammad,¹ Imronudin²

¹ UIN Syarif Hidayatullah

Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

riza.muhammad15@mhs.uinjkt.ac.id

² Institut Ummul Quro Al-Islami

Jl. Mohnoh Nur No.112, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

imronudin@iuqibogor.ac.id

Abstrak:

Pendidikan intereligi merupakan solusi untuk masyarakat yang pluralistik, sebab berusaha memahami keunikan dari setiap agama untuk bersama-sama menjalin komunikasi berdasarkan tradisi agama masing-masing, akan memunculkan titik temu kesepahaman dalam beragama. Dalam ruang publik yang terbuka, sangat terasa urgensinya untuk membangun toleransi aktif karena setiap agama sama-sama memiliki hak untuk tumbuh dan membangun moderasi tanpa mengucilkan agama yang berbeda darinya. Jika tidak segera dibumikan, maka akan sulit membangun harmonisasi beragama di ruang publik sehingga akan terus melahirkan konflik disertai pengakuan eksistensi satu agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, usaha mengungkap realitas empiris. Pendekatan dan analisa yang digunakan adalah verstehen dan fenomenologi, yakni keterbukaan manusia dengan realita dunianya dimana dirinya hidup dengan memahami konsep dasar, hambatan, prospek, dan bentuk-bentuk pendidikan intereligi sebagai wacana moderasi antar umat beragama. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pendidikan ini menanamkan pengetahuan luas, berkemanusiaan dan meminimalisir konflik, karena umat beragama bebas berdiskusi dan mencari titik persamaan, sekalipun keadaan mereka berbeda.

Kata kunci: Pendidikan Intereligi, Ruang Publik

Abstract:

Interreligious education is a solution for a pluralistic society, because it seeks to understand the uniqueness of each religion to jointly establish communication based on their respective religious traditions, so that a common point of understanding in religion emerges. In a public sphere, the urgency of building active tolerance is felt because every religion has the same right to grow and build moderation without excluding religions that are different from it. If it is not immediately grounded, it will be difficult to build religious harmonization in the public sphere so that it will continue to give birth to conflicts accompanied by the recognition of the existence of one religion. This study uses a qualitative method, an attempt to reveal empirical reality. The approach and analysis used are verstehen and phenomenology, namely the openness of humans to the reality of the world in which they live by understanding the basic concepts, obstacles, prospects, and forms of interreligious education as a moderation discourse between religious communities. This study concludes, this education imparts broad, humane knowledge and minimizes conflict, because religious people are free to discuss and find common ground, even though their circumstances are different.

Keywords: Interreligious Education, Public Sphere

Pendahuluan

“Kita semua manusia, tidak peduli bagaimana cara kita berdoa.” Tutur Bashir Caudhry, ketua The League British Muslim. Di saat ekstremis membunuh pelan-pelan perdamaian agama di dunia, hampir 14 tahun Liga Muslim Inggris di Ilford merayakan natal bersama-sama dengan Idul Fitri, Waisak, Hanukkah, dan Diwali.¹

Liga Muslim di Inggris telah membuat komunitas lintas iman sebagai proses pengembangan (*prototype*) tugas mulia agama yaitu menciptakan perdamaian. Hadirnya komunitas tersebut, selain mengusung misi perdamaian, juga meningkatkan pemahaman lintas agama dan toleransi.

Situasi rasa takut akan dialami oleh umat beragama jika mereka tidak saling berkomunikasi, artinya tidak saling memahami (*mutual-understanding*) antara umat beragama. Mencari titik temu persamaan adalah kebutuhan bagi umat beragama agar terciptanya kebersamaan dalam membangun peradaban dunia.

Namun, hambatan mendasar yang dimiliki oleh penganut agama adalah pemahaman parsial tentang kemajemukan dan keberagaman, seharusnya dalam konteks pluralitas agama menjadikan seorang yang berteologi selalu bersifat intereligiuitas. Di samping itu, klaim kebenaran (*truth of claim*) menjadi hambatan nyata, sebab terlalu sering bercampur dalam politik praktis² yang berhasil mencabik-cabik harapan besar, bahwa agama memiliki peran dalam masyarakat demokratis demi perdamaian dunia.³

Begitu juga dengan kesalahpahaman tentang inisiatif pendidikan dan dialog intereligiuitas di mata kalangan umat atau pemuka agama.⁴ Pengertian yang *masyhur* di masyarakat misalnya, bahwa dialog intereligiuitas adalah mencari kelemahan setiap agama dan saling mengalahkan satu agama dengan lainnya, padahal tidak demikian. Pada akhirnya, akan lahir sikap negatif pada umat beragama, yakni satu agama menjadi ancaman bagi yang lainnya.⁵

Penolakan sebagian masyarakat menjadikan pendekatan tentang apa itu eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme seakan omong kosong belaka dan tak cukup menjelaskan kemajemukan untuk membantu pemahaman antar umat

¹ Don de Silva, *Islamophobia: Sebuah Acara Natal yang Tidak Biasa (inggris)* (Bandung: Mizan, 2015), 235.

² Ahmad Wahib menyebutnya dengan frustrasi politik. Umat Islam merasa terjepit atau sengaja dijepit, dengan arti umat Islam yang mayoritas dibanding Kristiani sering tidak diperlakukan secara proporsional dalam pembagian kekuasaan politik. Terlebih asumsi yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh Islam dihalang-halangi untuk aktif dalam pemerintahan. Akibatnya, pihak-pihak lain dianggap mengganggu, merugikan, dan membahayakan. Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*, (Jakarta: LP3S, 1995), 182.

³ Imronuddin, *Pendidikan Inter-Religius Perspektif Al-Qur'an*, (Bekasi: Bahasa Cerdas Hati, 2021), 132.

⁴ Kesederhanaan penafsiran melahirkan pemahaman agama yang formalistik, sehingga tidak sadar perbedaan kafir di zaman Nabi dan di hari ini. Mereka lemah terhadap dua hal, tidak memahami gejala kejiwaan manusia sebagai individu dan penyingkapan rahasia manusia sebagai individu dari manusia-manusia lainnya dan kedua, tidak memahami gejala-gejala kemasyarakatan. Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*, 180.

⁵ Danang Kristiawan, “Merengkuh yang Lain: Dialog Interreligius dan Transformasi Diri terhadap yang Lain,” *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2020): 59.

beragama demi terwujudnya relasi konstruktif antar agama.⁶ Pluralisme misalnya, sering dianggap sebagai biang pemurtadan dan konversi agama seseorang karena menjadi ancaman serius bagi kemurnian dan kesucian agama Islam.⁷

Ini semua terjadi akibat tidak selesainya transformasi *intern* tentang pengetahuan dan pemahaman bagi pemeluk dan lembaga agama secara seimbang dan benar sehingga muncul sikap saling curiga. Konflik sejarah dan sosial politik menjadi beban dan ingatan traumatis. Sikap merasa paling sempurna memunculkan agresif dan defensif dalam beragama. Ada kecenderungan takut berpolemik bila mengungkapkan gagasan keagamaannya.⁸

Di balik permasalahan yang dihadapi, tentu ada momentum titik balik untuk mencapai keindahan. Dari krisis tersebut dapat diambil pelajaran dan membawa harapan untuk menciptakan dunia dan masa depan yang lebih baik.

Seharusnya mobilitas dunia modern,⁹ dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, agama-agama saling terhubung dalam satu kontak besar dan dengan kecepatan yang lebih besar pula. Dengan arti, pencarian makna, keinginan belajar bentuk-bentuk agama, metode baru meditasi, dan doa serta kebutuhan batin menembus batas-batas tradisi agama. Bahkan, melalui pencarian makna akan melahirkan jenis baru dalam beragama dan menimbulkan masalah filosofis dan teologi baru.¹⁰

Studi ini menawarkan sekaligus memperkuat penelitian tentang gagasan pendidikan intereligi sebagai wacana moderasi beragama di ruang publik. Masyarakat hari ini membutuhkan gagasan yang mencerahkan dan nilai-nilai universal. Institusi dan sarana yang dianggap tepat untuk mewujudkan ide tersebut adalah institusi pendidikan, karena pendidikan ialah media strategis bagi pertumbuhan kesadaran intereligi di kehidupan nyata.

Pendidikan intereligi sejatinya menawarkan solusi atas titik temu pemahaman antara agama, dengan demikian akan terjadi nilai, amalan, atau tindakan sesuatu penganut agama yang berlandaskan agama dengan penganut agama lain, baik dalam hubungan dengan Tuhan, manusia atau alam dalam segenap kehidupan.

⁶ Yehezkiel Richard Halomoan Siagian, "Beyond Pluralism: Pendekatan Open Integrity Gerardette Philips sebagai Sebuah Upaya Dialog Pluri-Religius dalam Berteologi Interreligius di Indonesia," *Jurnal Aradha* 1, no.1 (2021): 2.

⁷ Bagi mereka dampak dari pluralisme agama adalah menyerang al Qur'an, karena pandangan yang relative terhadap kebenaran otentitas kitab suci al Qur'an. Selain al Qur'an anggapan mereka adalah menyerang syari'at, yaitu kaum pluralis berusaha menciptakan syari'at baru dan memaksakan umat Islam melalui perundang-undangan. Adian Husaini, *Pluralisme Agama Haram*, (Pustaka Kaustar: Jakarta, 2005), 49, 55, 61.

⁸ Imronuddin, *Pendidikan Inter-Religius Perspektif Al-Qur'an*, (Bekasi: Bahasa Cerdas Hati, 2021), 133.

⁹ Manusia modern semakin kehilangan unsur kemanusiaannya karena telah menggantungkan dirinya pada eksistensi kebendaan yang bersifat relatif dan nisbi. Manusia merasa sebagai makhluk superior (super being), semua permasalahan diselesaikan dengan menggunakan rasio dan teknologi semata –menurut kaum perenis– kebebasan manusia terwujud ketika manusia telah terbebas dari keterikatan "kenisbian" dan bergantung pada kemuatlakan Tuhan. Arqom Kuswanjoro, "Filsafat Perennial dan Rekonstruksi Pemahaman Keagamaan," *Jurnal Filsafat UGM*, 2006, 97.

¹⁰ Gerrardette Philips, *Melampaui Prularisme: Integritas Terbuka sebagai Pendekatan yang Sesuai bagi Dialog Muslim-Kristen*, 60-61.

Titik temu pemahaman antara agama yaitu dengan mencari titik persamaan dalam nilai-nilai kebaikan, di samping menghormati perbedaan antara agama. Titik temu pemahaman antara penganut agama wajar dilaksanakan untuk mencapai perpaduan, keharmonian dan keamanan, terutama di negara masyarakat majemuk. Kajian ini tentunya akan bersinggungan dengan dimensi moralitas dalam pendidikan dan aspek-aspek titik temu pemahaman antara penganut agama, terutama dalam diri para pelajar itu sendiri.¹¹

Dengan semakin terbuka bebas ruang publik (*public sphere*),¹² menurut Jurgen Habermas, maka semakin sehat dialog-dialog yang dihadirkan dan demokratis pula manusia di dalamnya. Artinya, umat antar agama di masa depan akan lebih saling menghormati dan menghargai keunikan satu dengan lainnya. Bersamaan dengan itu pula, sektarianisme, simbolisme, dan ekstremisme akan tenggelam di ruang masa lalu.

Ketika agama bersifat membebaskan, maka agama dapat memberikan sumbangsih bagi ruang publik yang demokratis, tidak memandang asal-usul etnis, agama, jenis kelamin, dan golongan tertentu. Konsekuensinya yaitu agama-agama dapat mengakomodir nilai-nilai yang universal, seperti kemiskinan, kedaulatan hukum, dan kebebasan menyatakan pendapat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan adalah kualitatif yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang bersifat alamiah (*realitas empiris*) secara holistik. Rangkaian fakta dikumpulkan, dikelompokkan, dijelaskan, dan disajikan agar dapat menghasilkan teori.¹³

Verstehen sebagai sifat dari jenis penelitian ini yakni berupaya memahami sebagai ciri eksistensial manusia (prarefleksif). Sikap eksistensial adalah keterbukaan manusia terhadap dunianya. Dengan menggunakan *verstehen*, penelitian ini sangat terkait dengan waktu terutama di masa depan.¹⁴

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *fenomenology analysis* sebagai respons penciptaan makna, sebuah aktivitas dan pengungkapan tentang diri sang pembicara. Dengan kata lain, sebuah usaha mengungkap maksud tersembunyi yang ada dibalik produksi bahasa. Upaya ini dilakukan agar terwujud usaha memahami konsep dasar, hambatan, prospek, dan bentuk-bentuk pendidikan intereligi sebagai wacana moderasi antar umat beragama, dan tidak lagi bersifat monolog. Sebab kehidupan beragama di Indonesia dewasa ini sering terjadi monopoli kebenaran dan alergi dengan pemikiran-pemikiran di luar agamanya.

¹¹ Kamarudin Salleh, Yang marya abd Khahar, "Elements of Inter-Religious Understanding in Islamic and Moral Education Curriculum," *ISLAMIYYAT* 38, no.2 (2016): 1.

¹² Ketika sekularisasi kehilangan eksistensinya. Maka, sebuah awal dari peran komunikasi agama dengan perantara diskursus, yaitu proses dialog penganut agama dengan argument masing-masing untuk mencapai satu kesepakatan bersama. Leo Agung Sri Gunawan, "Diskursus Agama dalam Ruang Publik Menurut Jurgen Habermas", *Logos: Jurnal Filsafat – Telologi* 16, no. 2 (2019): 1.

¹³ Maman Kh, Dede Ridwan dkk, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik*, Cet. 1, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006), 70, 75.

¹⁴ F. Budi Hardiman, *Heidegger dan Mistik Keseharian; Suatu Pengantar Menuju Sein und Zeit* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia KPG, 2003), 73, 180.

Konsekuensi terekstrimnya yaitu munculnya sikap beragama yang eksklusif, kaku, dan menutup diri.

Paradigma Pendidikan Intereligiuitas: Humanisme sebagai Jembatan Menuju Pendidikan Intereligiuitas

Para penganut humanisme berkeyakinan, bahwa pendidikan akan menumbuhkan integritas pribadi secara bebas dan bertanggung jawab. Mereka menjadikan pendidikan sebagai perantara individu untuk menyakinkan kebenaran melalui struktur keilmuan. Media ini paling ampuh dalam pembentukan karakter pribadi dan penyebaran nilai-nilai budaya sebagai penggagas suatu keilmuan.¹⁵

Dalam *Modern Philosophy of Education* dijelaskan bahwa pendidikan sebuah simbiosis mutualisme setiap individu dengan sosio-kulturalnya. Pendidikan merupakan pola untuk mengembangkan potensi manusia, baik moral, intelektual, dan jasmani untuk diri sendiri dan juga masyarakat. Artinya, pendidikan secara hakikat ialah usaha sadar setiap manusia, baik dengan pendidik atau secara mandiri dalam upaya pemberdayaan segala potensi manusia, termasuk rohani agar dapat menciptakan kehidupan yang fungsional dan bernilai bagi individu dan lingkungannya.¹⁶

Seharusnya bagi masyarakat demokratis¹⁷ menjadi penting mengatasi konflik seperti masalah antar-agama melalui pendidikan, dengan arti memperkuat gagasan pendidikan, ide toleransi dan penghormatan melalui hak asasi manusia.

Sheila C. Gordon, Benjamin Arenstein mengingatkan lewat pedoman UNESCO bahwa pendidikan antar agama bertujuan untuk secara aktif membentuk hubungan antara orang-orang dari berbagai agama. Mereka menekankan bahwa agama adalah lintas budaya dan internal yang beragam, karena mereka berinteraksi dengan praktik-praktif dan nilai-nilai budaya antara satu dengan lainnya.¹⁸

Seiring berjalannya waktu, pendidikan agama mengalami perkembangan menjadi pendidikan keagamaan. Jika pendidikan agama menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama, maka pendidikan keagamaan bertujuan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Pendidikan agama juga menekankan aspek toleransi sehingga tidak hanya memahami satu agama saja, tetapi bagaimana mereka sama-sama saling menghormati antar umat beragama. Dengan demikian, hasil capaiannya adalah kepekaan terhadap keadaan sosial dan lingkungan sekitar.¹⁹

Dengan kata lain, studi agama ditekankan sebagai satu bidang kajian ilmiah dengan pendekatan historis – empiris – kritis. Perubahan sistem penyelenggara pendidikan mesti dilakukan sehingga memberikan basis kuat, meskipun

¹⁵Muhammad Aji Nugroho, “Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural; Sebuah Upaya Membangun Pemahaman Keberagaman Inklusif pada Umat Muslim” *Mudarrisa Jurnal Kajian kependidikan Islam* 8, no. 1 (2016): 1-2.

¹⁶Suripto, “Teologi Pendidikan Multikultural” *Edukasi* 05, no. 01 (Juni 2017): 6.

¹⁷Sejatinya Negara yang menganut sistem demokrasi artinya harus siap melewati masa-masa yang panjang, karena demokrasi bukanlah sistem permanen, tetapi sebuah proses (never ending process) dan metode guna mencapai tujuan bernegara. I. Wibowo, Abd. Rohim Ghazali, *Negara dan Bandit Demokrasi*, (Jakarta: Kompas, 2011), 65.

¹⁸Sheila C. Gordon, Benjamin Arenstein, “Interfaith Education: A New Model for Today’s Interfaith Families” *Int Rev Educ* (2017): 2.

¹⁹Imronuddin, *Pendidikan Inter-Religiuitas Perspektif Al-Qur’an*, 47.

kelemahannya seolah hanya kalangan intelektual saja yang dapat menikmati studi masing-masing agama. Lebih jauh lagi, mereka yang bukan berlatar belakang intelektual tidak bisa menikmati kajian intereligi tentang “memahami perbedaan”. Oleh karenanya, perlunya kesadaran, dukungan dan penerimaan pemuka agama, mengutip Nurcholish Madjid, bahwa realitas kehidupan beragama yang pluralistik adalah pertalian sejati dalam ikatan peradaban.²⁰

Berdasarkan aspek-aspek kognitif, afektif, dan sikap (*attitude*) dalam pendidikan keagamaan dibedakan menjadi 3 varian, *mono-religius*, *muti-religius*, dan *inter-religius*. Secara kognitif, pendidikan model *mono-religius* bertumpu pada cara memberikan pengetahuan atas satu agama tertentu kepada seseorang, tetapi agama lain diikutsertakan hanya sebagai klaim kebenaran tradisi agama tertentu. Secara afektif, model *mono-religius* ditujukan untuk meningkatkan minat dan melibatkan siswa pada suatu agama tertentu. Dalam hal sikap (*attitude*), model ini dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan siswa dalam aktivitas keagamaan tertentu serta membentuk sikap dan perilaku siswa sesuai dengan norma dan ajaran agama tertentu.

Pada model *multi-religius* menitikberatkan pengenalan kepada banyak agama sebab kebutuhan memahami kemajemukan agama dalam pandangan yang positif. Model *multi-religius* ini menekankan verifikasi terhadap tradisi berbagai agama dalam dan keyakinan agama direpresentasikan dengan cara mereka sendiri. Secara afektif, model *multi-religius* bertujuan untuk menumbuhkan ketertarikan siswa dalam mempelajari berbagai agama. Dalam hal sikap, model ini berusaha untuk menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap pemeluk agama yang berbeda.²¹

Fokus pendidikan intereligi secara afektif adalah komunikasi antar penganut agama yang berbeda. Ciri-cirinya adalah usaha mengungkapkan keunikan tradisi keagamaan dan melakukan evaluasi kemajemukan agama dalam konteks positif. Model ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap yang terbuka dalam menerima dan berdialog dengan agama lain. Dalam dialog, setiap peserta didik belajar untuk mengadopsi perspektif tradisi keagamaan masing-masing. Dalam dialog-dialog yang dibangun, siswa mendiskusikan agamanya sendiri dan agama-agama lain melalui berbagai perspektif.²²

Ini dapat dibuktikan melalui penelitian yang berkembang terkait pendidikan intereligi di Amerika Serikat (AS) misalnya, melalui Komunitas Antaragama *Interfaith Council of Metropolitan Washington (IFC/IFCMW)*, yaitu organisasi organisasi-organisasi yang dibuat dan dipimpin oleh keluarga Yahudi/ Kristen yang beragama ganda.

Mereka menyatakan, gagasan ini memiliki paradigma, bahwa keluarga dapat memiliki dua keyakinan yang berbeda dalam satu rumah tangga dan bahwa - dengan rasa hormat dan pendidikan - keluarga dapat menjadi harmonis, agama dapat ditularkan, dan toleransi secara luas dipupuk.

²⁰ Imronuddin, *Pendidikan Inter-Religius Perspektif Al-Qur'an*, 49.

²¹ Mohamad Yusuf, Carl Sterkens, “Pengaruh Negara dan Organisasi Keagamaan pada Kebijakan Sekolah berbasis Agama” *Masyarakat Indonesia* 39, no. 1 (Juni 2013): 3.

²² Mohamad Yusuf, Carl Sterkens, “Pengaruh Negara dan Organisasi keagamaan pada Kebijakan Sekolah berbasis Agama”, 5.

Miniaturnya khusus untuk AS dan untuk keluarga dengan warisan Yahudi dan Kristen, bangunan dan strukturnya memiliki potensi yang signifikan untuk dapat beradaptasi dengan kombinasi agama lain, budaya dan negara lain. Keluarga multi-budaya, dan khususnya antar agama saat ini membutuhkan strategi pendidikan baru untuk membantu mereka memahami akar budaya mereka dan mengidentifikasi dan memperjelas aspek apa dari warisan mereka yang ingin mereka pancing dan pindahkan ke anak mereka.²³

Sosiolog Jean-Paul Willaime mencatat, demokrasi liberal memberikan panduan dalam pendidikan agama dengan mengakomodasi hak-hak dan kebebasan mereka dalam beragama. Semua negara Eropa “apapun sistem hukumnya” berusaha memberikan kebebasan terkait keyakinan agama dan menghormati hati nurani siswa dan keluarga, di saat yang sama mendidik mereka dengan kebebasan pemikiran dan sikap kritis.

Dengan demikian, ditemukan bahwa Negara yang menganut sistem pendidikan agama yang berbeda di sekolah mereka akan “belajar menghormati semua orang, apapun agama mereka” Pendekatan ini menghasilkan kebebasan berpikir kritis, menghalangi hegemoni agama, dan identitas agama.²⁴

Pendidikan intereligi merupakan paradigma pendidikan mutakhir untuk pendidikan agama, yaitu pendidikan “dual-agama” “*non doctrinaire*” Tidak kaku dikhususkan untuk doktrin agama atau teori tertentu.²⁵ Kata “intereligi” memiliki kesamaan dengan multikulturalisme, dan pluralisme, yakni sebagai pondasi dasar untuk masuk ke ruang pendidikan intereligi sehingga ruang saling memahami (*mutual-understanding*) dan menciptakan integrasi sosial antar umat beragama menjadi kenyataan, lalu menghasilkan masyarakat yang memiliki keselarasan fungsi nilai-nilai universal.

Pondasi untuk masuk ke dalam pendidikan intereligi, yaitu dengan memahami secara utuh ide pluralisme, multikulturalisme, dan intereligi. Jika salah satu dari kata plural dan multikultural ditambahkan imbuhan *Isme*, tentu memiliki arti yang berbeda. Pluralisme yaitu pemahaman atas keberagaman yang menekankan entitas perbedaan setiap masyarakat, tetapi kurang memperhatikan interaksinya.²⁶

Sedangkan multikulturalisme adalah pemahaman yang menekankan interaksi dengan memperhatikan keberadaan sikap kebudayaan sebagai entitas yang memiliki hak-hak yang setara sehingga secara normatif yang akan melahirkan sikap toleransi, kerukunan, saling menghargai, dan hak-hak masing-masing kebudayaan penyusun suatu bangsa.²⁷ Sedangkan istilah “inter” dalam pendekatan religius

²³ Sheila C. Gordon, Benjamin Arenstein, “Interfaith Education: A New Model for Today’s Interfaith Families”, 1.

²⁴ Imronuddin, *Pendidikan Inter-Religius Perspektif Al-Qur’an*, 52.

²⁵ Sheila C. Gordon, Benjamin Arenstein, “Interfaith Education: A New Model for Today’s Interfaith Families”, 1.

²⁶ Achmad Fedyani Syaifuddin, “Membumikan Multikulturalisme di Indonesia”, *Jurnal Antropologi Sosial Budaya Universitas Indonesia* 2, (April 2006): 4.

²⁷ Muhammad Aji Nugroho, “Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural; Sebuah Upaya Membangun Pemahaman Keberagaman Inklusif pada Umat Muslim “ *Mudarrisa Jurnal Kaijan kependidikan Islam* 8, no. 1 (Juni 2016).

berarti memahami posisi religius seseorang dalam kaitannya dengan kemungkinan-kemungkinan religius lainnya.²⁸

Dalam teologi pluralisme misalnya, setiap manusia diajarkan bahwa menjadi religius adalah tugas etis bersama, yaitu menjalankan kehidupan dengan bertanggung jawab secara global. Dengan demikian semua umat beragama bisa saling menghidupkan dan memperbaharui nilai-nilai universal.

Paul. F. Knitter berpendapat, dari pluralisme dapat diambil pelajaran bagaimana agama-agama dapat berdialog secara jujur dan terbuka sehingga dapat memberikan sumbangsih penting dalam menanggulangi penderitaan manusia dan kerusakan lingkungan yang akut. Juga Wilfred Cantwell Smith, menurutnya pluralisme agama merupakan tahap baru yang sedang dialami dunia agama-agama. Syarat utama tahapan ini adalah kita semua diminta untuk memahami tradisi keagamaan lain di samping tradisi keagamaan sendiri.²⁹

Dalam perkembangannya, pluralisme agama di Barat terbagi menjadi 2 mazhab, teori global (*global theory*) dan kesatuan transendensi agama (*trancendent unity of religions*). Global Theory menurut beberapa peneliti, misalnya Peter Bayer dalam *Religion and Globalization* dan Jams A. Becford dan Thomas Luckman dalam *The Changing Face of Religion* – lahir disebabkan tuntutan modernisasi dan globalisasi. Konsep bebas geografi, kultural, ideologis, teologis, kepercayaan ditawarkan karena agama dianggap akan berevolusi dan akan saling mendekat, pada akhirnya tidak ada perbedaan satu dengan lainnya.

Trancendent unity of religions, adalah pendekatan religious filosofis dan membela eksistensi agama-agama. Bagi kelompok yang dicetuskan oleh Rene Guenon, TS. Eliot, Fritjhof Schuon, Louis Massignon, Sayyed Hossen Nasr, dan William C.Chittick ini, agama tidak bisa diubah begitu saja dengan mengikuti zaman globalisasi, zaman modern atau *post-modern* yang telah meminggirkan agama. Agama tidak dapat dilihat dari perspektif sosiologis ataupun historis dan tidak pula dihilangkan identitasnya.³⁰

Sedangkan dunia Islam sudah memperkenalkan pluralisme melalui rumusan teologis. Pluralisme aturan Tuhan yang tetap sehingga tidak bisa dilawan dan diingkari. Dasar pluralisme ialah pengakuan keberadaan sosial – budaya dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah (QS. 5: 44-55). Di dalam al Quran (QS. 2: 136, 4: 163-165, 45: 16-18) memerintahkan agar umat muslim mengimani semua Nabi, baik yang disebutkan dalam al Quran atau tidak. Dengan demikian, agama tidak boleh dipaksakan, bahkan isyarat al Quran menyatakan tentang penganut berbagai agama, asalkan percaya kepada Tuhan dan hari Kemudian, berbuat baik semuanya akan selamat (QS. 2:62, 5:16).

Dalil pokok pluralisme agama menurut Abdul Aziz Sachedena dalam *The Islamic Roots for Democratic Pluralism* – terkait hubungan keyakinan pribadi dan

²⁸ Gloria Durka, “The Philosophical and Theoretical Aspects of Interreligious Education” Judul ini termuat dalam buku *Internasional Handbook of Interreligious Education* (London and New York: Springer Dordrecht Heidelberg), 1.

²⁹ Gerrardette Philips, *Melampaui Pluralisme Integritas Terbuka sebagai Pendekatan yang Sesuai bagi Muslim-Kristen*, 11.

³⁰ Khairul Faizin, “Kritik atas Nalar Kritis Pluralisme Agama” *Jurnal al- 'Adālah* 16, no. 2 (November 2013): 194.

proyeksi publik al Quran tidak ikut campur mengenai keyakinan pribadi, otoritas tersebut mesti berdasarkan keyakinan intern setiap individu. Sedangkan dalam proyeksi publik menganut prinsip koeksistensi, keinginan mengakui komunitas lain dalam mengurus agama mereka secara berdampingan.³¹

Menurut John Bowden di dunia yang pluralis ini harus ditanamkan sikap inklusif dalam keberagamaan bagi setiap individunya. Ia mengusung "etika global" sebagaimana Hans Kung dan Yayasan Etika Globalnya. Etika global juga dibuktikan dalam "Deklarasi menuju Etika Global" dan disetujui parlemen agama-agama di Chicago di tahun 1993. Pendekatan ini dilakukan karena berkeyakinan bahwa umat manusia dan agama besar, pemimpin, pembesar agama, guru dengan sarana yang dimiliki mampu memberikan dukungan terhadap tuntutan nilai "etis mendasar" bagi semua agama, seperti "Tidak ada pembunuhan, pencurian, amoralitas seksual, dan kebohongan."³²

Pertama-tama, kesabaran, toleransi, dan pemahaman akan dibutuhkan, semangat kerjasama dengan mempertimbangkan semua faktor yang telah dijelaskan di atas dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Kedua, bahkan lebih sulit, akan ada kebutuhan untuk tidak hanya terlibat dalam dialog yang sopan tetapi juga siap untuk terlibat dalam argumen, untuk mengatasi perbedaan, dan memang berubah.

Jika demikian, wajah pendidikan akan mengalami konstruksi dan langkah-langkah aktual untuk meminimalisir pendidikan agama yang tekstualis eksklusif – radikal pada satu sisi, dan pentingnya mewujudkan wajah keberagamaan yang sejuk, toleran, pluralis dan inklusif, di tengah realitas masyarakat Indonesia yang multikultur, baik ditinjau dari segi agama, budaya, afiliasi politik, ekonomi dan pengkategorian lainnya, sekaligus untuk menunjukkan bahwa sejatinya, agama jalan cinta dan kedamaian, perdamaian, dan sangat menjunjung tinggi pluralisme dan merekomendasi pola keberagamaan inklusif.³³

Karena pemahaman konsep secara parsial dan ketidaktahuan tentang dasar-dasar pendidikan intereligiitas memungkinkan timbulnya penafsiran dan penyimpangan praktek pendidikan serampangan dan jauh dari visi pendidikan intereligiitas. Oleh karena itu, penyebaran informasi tentang pendidikan intereligiitas kepada semua pihak yang berkepentingan perlu mendapat perhatian dan harus diupayakan secara terencana dan sistematis.

Wacana Moderasi Beragama di Ruang Publik: Pendidikan Intereligiitas Solusi Hubungan antar Umat Beragama

Moderasi beragama suatu keniscayaan bagi umat manusia. Hadirnya ruang publik yang terbuka memberikan fasilitas berlebih dalam merangkul kebebasan berpendapat, tanpa adanya kekangan. Semestinya moderasi beragama

³¹ Muhammad Ali, *Teologi Pluralis Multikultural*, Cet. 1, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), 4-5.

³² Roger Boase, *Islam and Global Dialogue Religious Pluralism and The Pursuit of peace* (University of London: Ashgate Publishing Limited, 2005), 18.

³³ Edi Susanto, "Spiritualisasi Pendidikan Agama Islam: Menuju Keberagamaan Inklusif-Pluralistik" *Jurnal Nuansa* 11, no. 2 (Juli-Desember 2014): 4.

menjadi *common sense* masyarakat. Moderasi Beragama harus menjadi wacana yang mengisi ruang-ruang kemanusiaan di bawah bayang-bayang radikalisme.³⁴

Ini sebagai fitrah manusia, yaitu mendambakan kerukunan dan kedamaian. Dalam rangka mencapai impian setiap insan, diperlukan keadaan yang membentuk bangunan toleransi kerukunan umat beragama yang hakiki. Kerukunan dan toleransi yang hakiki tidak bisa dibentuk dengan cara pemaksaan dan formalisme, jika demikian yang terjadi, maka akan terjadi toleransi dan kerukunan “semu.” Toleransi dan kerukunan sejati dimulai dari kesadaran nurani dan inisiatif semua pihak yang terlibat di dalamnya.³⁵

Menurut Abdul Moqsith Ghazali, setiap agama memiliki hak yang sama dalam menjalani kehidupan beragama. Agama lain juga bisa eksis dalam segala bidang karena setiap agama memiliki konteks partikularnya sendiri-sendiri. Adanya realitas perbedaan *syarī’at* sebagai bukti, bahwa agama tidaklah sama. Gagasan pluralisme agama menghendaki setiap umat beragama untuk meyakini agamanya sendiri dan memberikan pengakuan aktif keberadaan agama lain, artinya pengakuan eksistensi agama-agama lain sebagaimana eksistensi agama yang dianutnya.³⁶

Pada dasarnya setiap agama ramah dan santun terhadap perbedaan sosial-kulturalnya. Perbedaan pemahaman tentang agama itulah memunculkan sikap sebagian umat beragama tidak toleran dan melakukan kekerasan atas nama agama. Sudah seharusnya filosofi pendidikan agama yang membenarkan agamanya sendiri tanpa ingin menerima keyakinan lain perlu dikritisi, dibenahi, dan dilakukan re-orientasi. Cara pandang masyarakat tentang agama lain harus “dibongkar” agar tidak lagi menganggap agama lain salah dan bukan jalan keselamatan. Jika tidak dibenahi, pasti akan merusak harmonisasi agama dan menghilangkan sikap saling menghargai sehingga menimbulkan konflik dan pengakuan soal eksistensi agama yang dianut.

Terlebih dalam masyarakat yang pluralistik, hubungan antar umat beragama begitu kental dalam mewarnai kehidupan sosial-politik. Terkadang juga bisa menimbulkan konflik yang tidak kalah dahsyatnya di antara kelompok masyarakat. Di sinilah faktor keagamaan mengandung paradoks. Di satu sisi, agama bisa menimbulkan energi perekatan antar manusia, tetapi di sisi lain, bisa menimbulkan energi perpecahan di antara golongan masyarakat.³⁷

Bagaimana tidak, agama selalu bertitik tolak pada pandangan normatif yang diajarkan oleh Kitab Sucinya. Terlebih kalau hal yang normatif dituangkan dalam bentuk hukum agama (*syarī’ah*) dalam Islam dan hukum canon dalam Kristen. Hukum agama bersifat abadi, dengan merubah hukum tersebut, maka telah mengusik kebenaran yang dibawa oleh agama tertentu. Bahwa kaum muslimin telah mengembangkan teori hukum agama (*ushūl al fiqh*), tetapi tidak menutup

³⁴ Nazar Naamy, Ishak Hariyanto, “Moderasi Beragama di Ruang Publik dalam Bayang-Bayang Radikalisme,” *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 3, no. 2 (Juli-Desember 2021): 53.

³⁵ Muchlis Hanafi, “Hubungan Antar Agama”, *Jurnal Suhuf* 1, no. 1 (2008): 38.

³⁶ Umi Sumbulah, Nurjanah, *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*, Cet. II, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 179.

³⁷ Didik Komaidi, “Pendidikan Agama di Tengah Pluralisme Bangsa: Dari Paradigma Eksklusif ke Inklusif”, *JPI FIAIJumsan Tarbiyah X*, (Desember 2005): 6.

kenyataan, antara ruang publik yang menganut demokrasi dan *syari'ah* memang terdapat perbedaan yang esensial.³⁸

Dalam ruang publik yang demokratis, justru sebaliknya dari ajaran agama, yakni membuka ruang seluas-luasnya bagi perubahan nilai oleh masyarakat. Ini menjadi ancaman tersendiri dalam agama. Misalnya, masalah perceraian gereja katolik Roma dan masalah perpindahan agama ke agama lain di agama Islam. Perceraian dalam agama Katolik berarti merusak kesucian perkawinan yang telah diberkati Tuhan dalam pandangan Katolik. Sedangkan berpindah agama berarti penolakan kepada kebenaran Allah sebagai Zat Yang Maha Besar (konsep tauhid), tidak dibenarkan karena pelakunya bisa diancam mati.

Namun, masyarakat yang demokratis tidak demikian. Kebenaran merupakan hak individual warga masyarakat dan justru harus ditegakkan dengan segala konsekuensinya. Artinya, ruang publik yang demokratis menganut keberadaan nilai universal agama-agama, yakni menyamakan derajat dan kedudukan warga negara di mata undang-undang, asal-usul etnis agama, jenis kelamin, bahasa ibu.

Dalam bahasa Abdurahman Wahid, bahwa fungsi transformatif yang dibawakan oleh agama bagi demokratisasi kehidupan masyarakat, harus berawal dari transformasi bagian dalam masing-masing agama. Transformasi kulit luar yang tidak bertumpu pada bagian dalam di lingkungan lembaga atau kelompok keagamaan hanyalah sesuatu yang dangkal dan temporer saja, seperti “demokrasi” Pakistan sebagai negara di tahun 1950-an.³⁹

Berdasarkan kerangka teori Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, dan Jams Fowler, pendidikan toleransi dan pluralisme yang menjadi solusi konkret ialah pendidikan interreligius. Alasannya, akan terjadi perjumpaan peserta didik dengan keberagaman baik agama, suku, maupun ras. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pendidikan intereligiitas mengantarkan siswa-siswi menjadi insan yang terbuka dan toleran. Pendidikan intereligiitas ini dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan serta program sekolah.⁴⁰

Mereka akan mendapatkan apa yang tidak ditemukan di sekolah yang menganut monoreligius. Misalnya, *pertama*, pertemuan dan pengalaman bersama, yakni pengalaman konkret hidup bersama dengan orang yang berbeda, artinya perjumpaan dengan keberagaman, baik segi agama, suku, dan ras. *Kedua*, pengetahuan, yaitu tentang menghilangkan egosentrisme untuk memahami perbedaan yang ada. *Ketiga*, *sharing* dan dialog. Berbekal pengetahuan dan pengalaman, mereka akan saling menerima dan menghargai perbedaan yang ada.

Di Indonesia (khususnya sekolah-sekolah negeri) menyatu dengan struktur kekuasaan. Jika pemerintah menginginkan keberadaan moderasi bergama berjalan dengan baik dan memberikan basis perubahan yang kuat, maka perlu melibatkan sistem penyelenggara pendidikan agama di sekolah dan menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah harus turun mengintervensi dengan tujuan-tujuan yang

³⁸ Abdurahman Wahid, *Islam Kosmopolitan; Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 286.

³⁹ Abdurahman Wahid, *Islam Kosmopolitan; Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, 287.

⁴⁰ Paulus Dwi Hardianto, “Pentingnya Pendidikan Interreligiitas di Sekolah Dasar” *Teologi Universitas Sanata Dharma* 03, no. 01 (Mei 2014): 7.

diharapkan, dengan begitu kekuasaan dan sekolah ikut serta dan terlibat aktif dalam membina sikap keagamaan yang pluralistik melalui pembelajaran Agama.⁴¹

Keterlibatan struktur penguasa dan organisasi keagamaan telah dibuktikan dalam penelitian Mohammad Yusuf dan Carl Sterkens, bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah Islam sejalan dengan yang diinginkan pemerintah, yaitu model monoreligius. Begitu juga dengan sekolah Islam yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan turut andil memperkuat model monoreligius ini. Bahkan, sekolah-sekolah Islam mendedikasikan waktu untuk pendidikan agama sekitar tiga hingga empat kali lebih banyak daripada waktu yang disyaratkan oleh pemerintah. Organisasi Islam menerapkan kurikulum tambahan untuk memperkuat ketaatan siswa dalam ibadah keagamaan.

Sebagian sekolah Katolik di Jawa Barat menjadi satu dari banyak sekolah yang menerapkan model interelijiuitas, sementara yang lain tetap menggunakan monoreligius. Kondisi ini menggambarkan, bahwa organisasi keagamaan akan mengikuti aturan pemerintah karena mereka sepakat untuk menerapkan model yang sama. Pada sekolah Hindu tidak banyak perbedaannya. Peran pemerintah karenanya sangat berpengaruh dalam memberikan kebijakan dalam bidang pendidikan sekalipun, organisasi keagamaan Hindu memberikan ruang dialog antar agama tetapi, mereka lebih memilih monoreligius bagi pendidikannya, meskipun sebenarnya mereka inklusif dengan pendidikan semua agama di sekolahnya.⁴²

Pendidikan monoreligius harus diubah menjadi multireligius dan interrelgius. Model ini hanya akan mengajarkan agamanya sendiri, artinya membuat orang “buta” tentang agama lain dan bersikap pasif terhadap keragaman. Model pendidikan monoreligius juga rentan terhadap ideologi radikal. Pendidikan model ini minim variasi dalam memberikan ilustrasi yang holistik, karena gambaran-gambaran sempit dan cenderung hanya memuji diri sendiri, tetapi “buta” terhadap pihak lain. Metode pembelajaran agama seperti ini akan memproduksi alumni-alumni yang tidak adaptif terkait dunia yang terus berubah. Bahkan, berpotensi menjadi satu gerombolan berideologi tunggal yang gampang dimobilisasi, padahal pembentukan masyarakat yang plural ialah hal yang sangat mendasar, terlebih di masyarakat penganut demokrasi.⁴³

Artinya, agama tidak melulu untuk diperdebatkan dan didefinisikan, tetapi untuk diamalkan dan dihayati karena agama sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Setiap orang berhak mengamalkan keyakinannya dan menyampaikannya kepada orang lain, dengan begitu dapat dijadikan dasar untuk saling memahami dan bersikap baik terhadap hubungan beragama dan aliran keagamaan itu sendiri.

Menjadi religius tidak perlu menyalahkan apa yang menurut sebagian pengaut agama benarkan. Sikap religius ialah menjalankan kehidupan bertanggung jawab secara global, ini tugas etis bersama. Melalui pendidikan interelijiuitas umat

⁴¹ Marzuki, “Pluralitas Agama dan Umat Beragama di Indonesia (Mencari Peran Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum)” *Cakrawala Pendidikan*, (Juni 2001): 9.

⁴² Mohamad Yusuf, Carl Sterkens, “Pengaruh Negara dan Organisasi keagamaan pada Kebijakan Sekolah berbasis Agama” *Masyarakat Indonesia* 39, no. 1 (Juni 2013): 3.

⁴³ Mahathir Muhammad Iqbal, “Pendidikan Multikultural Interreligiuitas: Upaya Menyemai Perdamaian dalam Heterogenitas Agama Perspektif Indonesia” *Sosio Didaktika* 1, no. 1 (Mei 2014): 7.

beragama bisa saling terhubung dan menghidupkan sekaligus memperbaharui nilai-nilai yang sifatnya parsial menuju hal-hal yang universal.

Penerapan pendidikan multireligius dan intereligiuitas tentu saja dilematik, kelabu, tidak putih dan juga hitam sebab problematisnya hubungan agama dan ruang publik. Bagi ruang publik yang terbuka, wacana ini harus ditelaah dalam jangka panjang karena sifatnya yang mencerahkan, esensial dan fundamental bagi kesinambungan pergaulan sosio-kultural dan interaksi manusia. Kesinambungan hidup dapat berjalan baik secara aman, indah, dan kreatif, manakala masyarakat pendukungnya memberikan ruang toleransi bagi kemajemukan.

Bahwa hakikat beragama adalah kesadaran untuk saling mengerti, memahami, dan menerima hidup damai, saling bekerja sama untuk kesejahteraan hidup. Selain itu, hakikat kehidupan umat beragama tidak sekedar makan, minum, dan aktivitas fisik belaka, malinkan berdasarkan “kesadaran” akal budi dari Tuhannya, dengan demikian niscaya membentuk “iklim” kedamaian dan berpihak akan kemanusiaan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa; pendidikan intereligiuitas merupakan pendidikan yang menitikberatkan setiap peserta didik agar memiliki pengetahuan yang luas, bermoral dan berkepribadian luhur untuk membangun toleransi aktif antar umat beragama. Hal tersebut sesuai dengan makna harmonisasi dalam kehidupan sosial dan sebagai solusi untuk menghindari konflik antar umat beragama. Prinsip dasar yang ditekankan untuk menuju pendidikan intereligiuitas yaitu pemahaman utuh tentang pluralisme, karena yang demikian berorientasi pada nilai-nilai universal, kemanusiaan, kebersamaan, kesetaraan, keadilan dalam hidup bermasyarakat, terutama pada kondisi masyarakat demokratis yang heterogen.

Dengan lahirnya pendidikan intereligiuitas, maka peserta didik akan diberikan pemahaman kritis dan merefleksikan diri tentang nilai-nilai universal dan apa saja nilai-nilai yang dianut selama ini. Siswa diajak untuk mengetahui latar belakang setiap agama, tidak ditinjau dari satu pandangan saja, tetapi dari berbagai sudut keyakinan masing-masing individu. Dari sini diharapkan peserta didik mampu menghargai sesama, tetap mentaati agama masing-masing dan melampaui orientasi simbolik dan formalistik dalam beragama.

Pendidikan intereligiuitas juga sebagai solusi dan miniatur pembelajaran di ruang publik yang terbuka. Ini kesempatan emas bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menerapkan pendidikan yang membunmi dan aplikatif karena sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikultural. Begitu juga para orang tua sebagai institusi terkecil agar secara bersama-sama bersikap inklusif dan bijak dalam menanggapi setiap perbedaan. Setiap keluarga harus belajar tentang bagaimana memberikan wawasan intelektual yang “cukup” untuk menghadapi masyarakat yang demokratis.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad. *Teologi Pluralis Multikultural*. Jakarta: Kompas, 2003.
 Durka, Gloria. "The Philosophical and Theoretical Aspects of Interreligious Education." *Internasional Handbook Of Interreligious Education*, 2016.

- Faizin, Kahirul. "Kritik atas Nalar Kritis Pluralisme Agama." *Jurnal Al Adalah*, 2013.
- Gunawan, Leo Agung Sri. "Diskursus Agama dalam Ruang Publik Menurut Jurgen Habermas." *Logos: Jurnal Filsafat -Teologi 1*, no.2 (2019).
- Gunawan, Leo Agung Sri. "Diskursus Agama Dalam Ruang Publik Menurut Jurgen Habermas." *Logos: Jurnal Filsafat-Teologi*, (2019).
- Hanafi, Muchlis. "Hubungan Antar Agama." *Jurnal Suhuf*, (2008).
- Hardianto, Paulus Dwi. "Pentingnya Pendidikan Interelijiustitas di Sekolah Dasar." *Theologi Universitas Sanata Dharma*, (2014).
- Hardiman, F. Budi. *Heidegger dan Mistik Keseharian: Suatu Pengantar Menuju Sein und Zeit*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003.
- Husaini, Adian. *Pluralisme Agama Hram*. Jakarta: Pustaka Kaustar, 2005.
- I. Wibowo, Abd. Rohim Ghazali. *Negara dan Bandit Demokrasi*. Jakarta: Kompas, 2011.
- Imronuddin. *Pendidikan Interelijiustitas Perspektif Al-Quran*. Bekasi: Bahasa Cerdas Hati, 2021.
- Iqbal, Mahatir Muhammad. "Pendidikan Multikultura Interelijiustitas: Upaya Menyemai Perdamaian dalam Heterogenitas Agama Perspektif Indonesia." *Sosio Didakta*, (2014).
- Kamaruddin Salleh, Yang Marya Abd Kahar. "Element of Inter-Reigius Understanding in Islamic and Moral Education Curriculum." *Islamiyyat*, (2016).
- Komaidi, Didik. *Pendidikan Agama di Tengah Pluralisme Bangsa: Dari Paradigma Eksklusif ke Inklusif*. Samarinda: JPI FIAU Umsam Tarbiyah, 2005.
- Kristiawan, Danang. "Merengkuh yang Lain: Dialog Interelijiustitas dan Transformasi Diri terhadap yang Lain." *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen 1*, (2020).
- Kuswanjoro, Arqom. "Filsafat Perennial dan Rekonstruksi Pemahaman Keagamaan." *Jurnal Filsafat UGM*, (2006).
- Maman Kh, Dede Ridwan, dkk. *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2006).
- Marzuki. "Pluralitas AGama dan Umat Beragama di Indonesia (Mencari Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum)." *Cakrawala Pendidikan*, (2001).
- Mohammad Yusuf, Carl Sterkens. "Pengaruh negara dan Organisasi Keagamaan pada Kebijakan Sekolah berbasis Agama." *Masyarakat Indonesia*, (2013).
- Nazar Naamy, Ishak Hariyanto. "Moderasi Beragama di Ruang Publik Dalam Bayang-Bayang Radikalisme." *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, (2021).
- Nugroho, Muhammad Aji. "Pendidikan Islam Berwawasan Mutikultural: Sebuah Upaya Memabangun Pemahaman Keberagaman Inklusif pada Umat Muslim." *Mudarrisa Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, no. 1 (2016).
- Richard, Yehezkiel, Halomoan Siagian. "Beyond Pluralism: Pendekatan Open Integrity Gerardette Philips Sebagai Sebuah Upaya Dialog Pluri-Religijs dalam Berteologi Interelijiustitas di Indonesia." *Jurnal Aradha 1*, (2021).

- Silva, Don de. *Islamophobia: Sebuah Acara Natal Yang Tak Biasa (Inggris)*. Bandung: Mizan, 2015.
- Suripto. "Teologi Pendidikan Multikultural." *Edukasi*, 2017.
- Susanto, Edi. "Spiritualisasi Pendidikan Agama Islam Menuju Keberagamaan Inklusif-Pluralistik." *Jurnal Nuansa*, 2014.
- Syaifuddin, Ahmad Fedyani. "Membumikan Multikulturalisme di Indonesia." *Jurnal Antropologi Sosial Budaya Universitas Indonesia*, 2006.
- Umi Sumbulah, Nurjannah. *Pluralisme AGama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Wahib, Ahmad. *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*. Jakarta: LP3S, 1995.
- Wahid, Abdurahman. *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.